



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2010
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
- a. penerbitan Surat Izin Mengemudi;
 - b. pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator;
 - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - d. penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan;
 - e. penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - g. penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah;
 - h. penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
 - i. penerbitan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - j. penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri;
 - k. penerbitan Kartu Sidik Jari (*Inafis Card*); dan
 - l. denda pelanggaran lalu lintas.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah sebesar pidana denda berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



SEPTO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2010
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2010
TANGGAL 25 MEI 2010

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | | SATUAN | TARIF |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| I | Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM): | | |
| | A. Penerbitan SIM A | | |
| | 1. Baru | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 |
| | 2. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 |
| | B. Penerbitan SIM B I | | |
| | 1. Baru | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 |
| | 2. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 |
| | C. Penerbitan SIM B II | | |
| | 1. Baru | Per Penerbitan | Rp 120.000,00 |
| | 2. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp 80.000,00 |
| | D. Penerbitan SIM C | | |
| | 1. Baru | Per Penerbitan | Rp 100.000,00 |
| | 2. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp 75.000,00 |
| | E. Penerbitan SIM D (khusus penyandang cacat) | | |
| | 1. Baru | Per Penerbitan | Rp 50.000,00 |

2. Perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | | SATUAN | TARIF | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------|------------|
| | 2. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp | 30.000,00 |
| | F. Pembuatan SIM Internasional | | | |
| | 1. Baru | Per Penerbitan | Rp | 250.000,00 |
| | 2. Perpanjangan | Per Penerbitan | Rp | 225.000,00 |
| II | Pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator | Per Ujian | Rp | 50.000,00 |
| III | Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | | | |
| | A. Kendaraan bermotor roda 2, roda 3, atau angkutan umum | Per Penerbitan | Rp | 50.000,00 |
| | B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih | Per Penerbitan | Rp | 75.000,00 |
| | C. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | Per Pengesahan/ Tahun | Rp | 0,00 |
| IV | Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) | Per Penerbitan/ Per Kendaraan | Rp | 25.000,00 |
| V | Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) | | | |
| | A. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 | Per Pasang | Rp | 30.000,00 |
| | B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih | Per Pasang | Rp | 50.000,00 |
| VI | Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) | | | |
| | A. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | | SATUAN | TARIF | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------|------------|
| | 1. Baru | Per Penerbitan | Rp | 80.000,00 |
| | 2. Ganti Kepemilikan | Per Penerbitan | Rp | 80.000,00 |
| | B. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih | | | |
| | 1. Baru | Per Penerbitan | Rp | 100.000,00 |
| | 2. Ganti Kepemilikan | Per Penerbitan | Rp | 100.000,00 |
| VII | Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah | Per Penerbitan | Rp | 75.000,00 |
| VIII | Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak | | | |
| | A. Senjata Api Non Organik TNI/POLRI | | | |
| | 1. Izin Penggunaan untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Purnawirawan | Per Kartu | Rp | 0,00 |
| | 2. Untuk kelengkapan tugas Polisi Khusus/ Satuan Pengamanan | | | |
| | a. Buku Pas (Izin Pemilikan) Senjata Api | | | |
| | 1) Buku Pas Baru | Per Buku | Rp | 150.000,00 |
| | 2) Buku Pas Pembaruan | Per Buku | Rp | 25.000,00 |
| | b. Izin Penggunaan | Per Kartu | Rp | 50.000,00 |
| | 3. Untuk Olah Raga | | | |
| | a. Buku Pas | | | |
| | 1) Buku Pas Baru | Per Buku | Rp | 150.000,00 |

2) Buku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | | SATUAN | TARIF | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------|--------------|
| | 2) Buku Pas Pembaruan | Per Buku | Rp | 25.000,00 |
| | b. Izin Penggunaan untuk Olah Raga | | | |
| | 1) Tembak Reaksi | Per Surat Izin | Rp | 50.000,00 |
| | 2) Target | Per Surat Izin | Rp | 50.000,00 |
| | 3) Berburu | Per Surat Izin | Rp | 100.000,00 |
| | 4. Untuk Koleksi | | | |
| | a. Buku Pas | | | |
| | 1) Buku Pas Baru | Per Buku | Rp | 150.000,00 |
| | 2) Buku Pas Pembaruan | Per Buku | Rp | 25.000,00 |
| | b. Izin Menyimpan | Per Surat Izin | Rp | 50.000,00 |
| | 5. Untuk Bela Diri | | | |
| | a. Buku Pas | | | |
| | 1) Buku Pas Baru | Per Buku | Rp | 150.000,00 |
| | 2) Buku Pas Pembaruan | Per Buku | Rp | 25.000,00 |
| | b. Izin Penggunaan | Per Kartu | Rp | 1.000.000,00 |
| | B. Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api | | | |
| | 1. Senjata Peluru Karet | | | |
| | a. Buku Pas | Per Buku | Rp | 25.000,00 |
| | b. Izin Penggunaan | Per Kartu | Rp | 225.000,00 |
| | 2. Senjata Peluru Pallet | | | |
| | a. Buku Pas | Per Buku | Rp | 25.000,00 |
| | b. Izin Penggunaan | Per Kartu | Rp | 225.000,00 |

3. Senjata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|----------------|---------------|
| 3. Senjata Peluru Gas | | |
| a. Buku Pas | Per Buku | Rp 25.000,00 |
| b. Izin Penggunaan | Per Kartu | Rp 75.000,00 |
| 4. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas | Per Kartu | Rp 50.000,00 |
| 5. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Kejutkan Listrik | Per Kartu | Rp 50.000,00 |
| C. Bahan Peledak komersial | | |
| 1. Izin Impor | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 2. Izin Ekspor | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 3. Izin Re-ekspor | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 4. Izin Gudang | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 5. Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 6. Izin Pembelian dan Penggunaan | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 7. Izin Produksi | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 8. Izin Pemusnahan | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| D. Kembang Api | | |
| 1. Izin Impor | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 2. Izin Ekspor | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 3. Izin Re-ekspor | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 4. Izin Gudang | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 5. Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |
| 6. Izin Pembelian dan Penggunaan | Per Surat Izin | Rp 500.000,00 |

7. Izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | | SATUAN | TARIF | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------|------------|
| | 7. Izin Produksi | Per Surat Izin | Rp | 500.000,00 |
| | 8. Izin Pemusnahan | Per Surat Izin | Rp | 500.000,00 |
| IX | Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian | Per Penerbitan | Rp | 10.000,00 |
| X | Penerbitan Surat Keterangan Laporan Diri | | | |
| | A. Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap | Per Kartu | Rp | 200.000,00 |
| | B. Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas | Per Kartu | Rp | 100.000,00 |
| XI | Penerbitan Kartu Sidik Jari (<i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Card/ Inafis Card</i>) | Per Kartu | Rp | 35.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



SEPTE SARTO NUGROHO